

ABSTRAK

Fikrika Khairunisa. 170101030039. *Peran Satpol-pp Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Pada Pasar Kaget Di Kota Banjarmasin)*
Pembimbing: (I) Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H., M.Hum, (II) Farihatni Mulyati S.Ag., M.HI, pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022

Kata Kunci: PPNS, Penegakan Hukum, Pasar Kaget

Pasar kaget merupakan salah satu jenis pasar tradisional non permanen yang berdiri diatas area yang tidak diperuntukkan sebagai tempat berdagang seperti di atas badan jalan maupun trotoar. Keberadaannya di kota Banjarmasin telah melanggar sejumlah aturan salah satunya terkait penyelenggaraan K4 yang didalamnya memuat ketentuan pidana. Ketentuan tersebut mengarah pada peran yang dimiliki Satpol-PP sebagai PPNS dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah atas keberadaan pasar kaget di kota Banjarmasin dan kendalanya dalam menjalankan perannya untuk menegakkan hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan observasi di salah satu pasar kaget yang sudah cukup lama berdiri di kota Banjarmasin yaitu Pasar Tunggging di jalan Cempaka Raya Kecamatan Banjarmasin Barat dan juga melakukan wawancara yang terdiri dari anggota PPNS Satpol-PP, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pedagang pasar kaget, dan masyarakat.

Peneliti mendapati bahwa Satpol-PP sebagai PPNS memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang mengarah pada proses penyidikan melalui tindakan represif pro yustisi. Sementara, peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah pada pasar kaget di kota Banjarmasin belum terlaksana. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala baik dari dalam maupun luar instansi Satpol-PP itu sendiri. Kendal-kendala tersebut seperti kurangnya tenaga PPNS dan penyelesaian perkara yang tidak mencapai ranah PPNS.